

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

No	Informasi (berisi informasi yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
1	Data dan Informasi Pagu Indikatif Rencana Kegiatan dan Anggaran	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
2	Progress Implementasi Kerja Sama Antar Lembaga	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permen No.65 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
3	Hasil Assesment	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
4	Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
5	Arsip Kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
6	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 2. Permen KP No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
7	Data Penyelesaian Kerugian Negara	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. PERMEN KP No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkup KKP 3. PERMEN KP No.4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
8	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup Politeknik AUP	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
9	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b dan huruf h. 2. Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Permen KP No.4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.
10	Data Personal Peserta Didik	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11	Data Transkrip/Daftar Nilai dan Ijazah Peserta Didik	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12	Proses Seleksi Penerimaan Taruna (Jalur Umum dan Jalur Khusus) - Daftar Peserta - Data pribadi peserta ujian - SK penilaian - Data-data verifikasi dan seleksi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Ani Leilani